

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan dan pengembangan wilayah administrasi di Indonesia menjadi semakin menarik setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah bahwa pembentukan suatu daerah otonomi baru dimungkinkan harus memenuhi syarat-syarat ekonomi, potensi daerah, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya seperti Pemindahan Ibukota Kabupaten yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Pada hakekatnya, penetapan atau pemindahan Ibukota adalah hal biasa terjadi diberbagai Daerah dan Negara. Ibukota merupakan suatu pusat kedudukan level pemerintahan baik itu Provinsi, Kabupaten, Kecamatan atau yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan. Penetapan atau Pemindahan Ibukota terjadi karena adanya pertimbangan teknis untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika masa depan. Pemindahan Ibukota juga dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan pengembangan seluruh masyarakat dan *stakeholder* secara menyeluruh sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa penetapan atau pemindahan Ibukota seringkali mengalami kesalahan pemaknaan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan karena kurang memperhatikan aspek-aspek penting lainnya, seperti

aspek sosial, ekonomi, keuangan dan kemampuan bertahan dalam perkembangannya, sehingga menyebabkan kontra-provokatif terhadap otonomi daerah. Hal penting yang tidak dapat diabaikan dalam mendorong pemindahan suatu Ibukota adalah aspirasi masyarakat menjadi sebuah keharusan untuk turut serta dipertimbangkan sehingga protes penolakan warga dalam pemindahan Ibukota yang seringkali menghiasi daerah-daerah dapat dihindarkan.

Terkait hal tersebut bahwa melihat fenomena pemindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan, pemerintah memaksa untuk tetap melakukan pemindahan Ibukota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan itu sendiri, dimana dalam subtransi pasal-pasal yang terdapat didalamnya sulit untuk dapat menciptakan pemerintahan di daerah yang efektif sebab terdapat 2 pasal yang multi tafsir dan juga berbagai alasan yang berbeda-beda sehingga terjadi pemindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan. Permasalahan pertama dipicu oleh keberadaan pasal 10 ayat (3) yang menyatakan bahwa “ *Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan di Banggai*”. Kemudian pasal 11 menyatakan bahwa “ *selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten Banggai Kepulauan, kedudukan Ibukota dipindahkan ke Salakan*”.

Keberadaan 2 pasal tersebut telah membawa polemik konflik horizontal antara masyarakat Banggai dan Salakan secara menyeluruh sebagai akibat dari letak kedudukan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan yang semula di Banggai di

pindahkan ke salakan. Masyarakat menilai bahwa pemindahan Ibukota Kabupaten dilakukan dengan cara paksa, tidak melalui prosedur administrasi pemerintah yang wajar. Oleh karena itu pemindahan Ibukota tersebut mendapat penolakan keras dari warga masyarakat Banggai sehingga menimbulkan konflik di antara anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka menarik untuk menggali lebih mendalam tentang konflik masyarakat akibat dari pemindahan Ibukota Kabupaten di Banggai Kepulauan dengan formulasi judul **“Konflik Berdarah Perebutan Wilayah” (Studi kasus di Kabupaten Banggai Kepulauan).**

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana latar belakang konflik berdarah perebutan wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan ?
- b. Apakah yang mempengaruhi faktor-faktor terjadinya konflik berdarah perebutan wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan ?
- c. Bagimanakah dampak konflik berdarah perebutan wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan ?

1. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

- a. Latar belakang konflik berdarah perebutan wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik berdarah perebutan wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- c. Dampak konflik berdarah perebutan wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan.

1. 4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan informasi yang faktual tentang latar belakang terjadinya konflik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta dampak konflik berdarah perebutan wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Sebagai usaha untuk menciptakan pengetahuan baru yaitu studi tentang konflik berdarah perebutan wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai konflik berdarah perebutan wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan baik bagi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Kecamatan.
- b. Hasil penelitian ini sebagai salah satu implementasi dan tanggungjawab terhadap Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo.